
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN DALAM PROGRAM
SOSIALISASI VAKSINASI
(Studi Kasus di Puskesmas Kedupok Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo)**

Oleh

Siti Marwiyah¹, Dinda Sandy², Dita Astutik³

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo, Jawa Timur

Email: ¹dindasandy09@gmail.com, ²ditaastutikayu17@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam program sosialisasi vaksinasi di puskesmas kedupok kecamatan kedupok kota probolinggo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap sejumlah informan dan pengamatan. Teknik analisis data mencakup pengumpulan data, data dikondensasi, data penyajian dan penarikan kesimpulan model Miles-Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan kebijakan dinas kesehatan dalam program sosialisasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kedupok Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo antara lain realisasi vaksin AstraZeneca kepada calon penerima vaksin, maka sosialisasi dari dinas kesehatan mengenai implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kedupok Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo menjadi sangat penting dilaksanakan yang bertujuan untuk menambahkan edukasi perihal penting dan manfaat vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu penelitian ini sangat disarankan guna meningkatkan pemahaman melalui program sosialisasi.

Keywords: COVID-19, Implementasi Kebijakan, Sosialisasi Vaksinasi

PENDAHULUAN

Sosialisasi merupakan upaya untuk memberikan informasi terkait dengan maksud dan tujuan dalam memberikan edukasi sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Pemahaman yang baik akan tercipta sebuah mindset atau pemikiran, melihat fenomena saat ini program vaksinasi terus di fokuskan di tengah pandemi COVID-19. Penggunaan vaksin sebagai bentuk upaya peningkatan daya tahan tubuh terhadap virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai dengan varian dosis vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Sinopharm yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Permasalahan tentang vaksin memang menjadi wacana dan rencana yang saat ini kurang lebih ditunggu banyak orang, setelah dilanda masa pandemic COVID-19. Virus COVID-19 ini juga berhasil membuat

pemerintah memaksa menggunakan kekuasaan negara yang dalam pengertian Max Weber, bisa menggunakan kekerasan fisik secara sah (Gerth & Mills, 1958; Budiarjo, 2008). Pemerintah juga memberikan aturan ketertiban terhadap masyarakat dengan berdasarkan sistem hukum yang perlu dilaksanakan dan karenanya diberikan kekuasaan yang memaksa (MacIver, 1926 dalam Budiarjo, 2008). Keterkaitan dengan pembahasan bagaimana kebijakan program sosialisasi vaksinasi oleh Dinas Kesehatan di Implementasikan pada Puskesmas Kedupok Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo.

**LANDASAN TEORI
Kebijakan Publik**

Kebijakan publik saling berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dimana dapat dijelaskan kebijakan public (public policy) merupakan serangkaian

tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Carl Friedrich 1969:79). Pada hakikatnya kebijakan public berdasarkan mengapdi kepada kepentingan masyarakat, kemudian pengertian lain kebijakan publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dengan berbagai kepentingan. Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. . implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan . keberhasilan suatu implementasi dalam diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle (1980) “pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah

ditentukan yaitu melihat kepada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan tersebut tercapai” perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Sosialisasi Vaksinasi

Sosialisasi vaksinasi dilaksanakan sebagai bentuk upaya memberikan informasi terhadap masyarakat dengan harapan memberikan sosialisasi yang melibatkan edukasi dalam menciptakan mindset yang lebih baik dalam pola pikir. Upaya pemberian arahan akan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan vaksinasi, cara sosialisasi dan edukasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepercayaan terhadap vaksin yang diberikan yakni bebas dan aman diberikan bagi masyarakat. Teori Health Belief Model (HBM) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan penerimaan vaksin COVID-19 pada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:225) mendefinisikan metode penelitian pendekatan kualitatif merupakan pengumpulan data dilakukan dari natural setting (kondisi alam), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak dalam observasi dan wawancara mendalam (in depth interview) setara dokumentasi. Lokasi penelitian terletak di puskesmas Kedupok Kelurahan Kedupok kecamatan Kedupok Kota Probolinggo. Pengumpulan data dimulai melalui pengumpulan data sekunder dan data primer. Selain pengambilan data melalui wawancara responden dari dinas kesehatan dan puskesmas kedupok. Model analisis data yang digunakan yakni model Miles-Huberman (2014:12-14) meliputi – data dikondensasikan (condensation data), data penyajian (display

data), dan ditarik kesimpulan (drawing conclusions). Bagian kaji data berisi akan pembahasan bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kota Probolinggo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksin merupakan salah satu bentuk kebijakan implementasi yang top-down, program tersebut tersentralisasi dari level pemerintah pusat kemudian kepada pemerintah Jawa Timur. Tugas Dinas Kesehatan ialah memberdayakan masyarakat untuk hidup mandiri dan sehat dengan tujuan memberdayakan keluarga agar lebih mampu menerapkan perilaku hidup yang lebih bersih dan sehat. Sebagai bentuk untuk mewujudkan lingkungan Pelayanan Kesehatan harus lebih bermutu, merata, terjangkau, serta berkesinambungan.

Dalam pengimplementasikan program vaksinasi, peran pemerintah tentu saja menjadi sesuatu hal yang paling penting dan utama dalam menentukan kesuksesan dan keberhasilan rencana dan rancangan yang telah dibuat mengenai program vaksinasi tersebut. Menurut (Retnaningsih, 2007) yaitu dengan adanya beberapa indikator seperti kebijakan, program, kegiatan dan pelaksanaan. Kebijakan yang dimaksud adalah bagaimana peran pemerintah membuat perencanaan program vaksinasi secara baik agar tujuan dari kebijakan yang dibuat tersebut dapat maksimal tersampaikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran penting. Dengan adanya program vaksinasi juga menjadi nilai keberhasilan dari kebijakan tersebut dengan dirancang dan diluncurkan program khusus yaitu program vaksinasi kepada masyarakat yang akan menjadi sebuah hal yang penting pada saat ini dalam melakukan sebuah kebijakan. Kemudian dengan adanya kegiatan yang bertujuan untuk implementasikan kebijakan dan program vaksinasi kepada masyarakat. Lalu yang terakhir adalah adanya pelaksanaan. Dengan adanya pelaksanaan maka kebijakan, program, dan kegiatan vaksinasi nilai dan poin

pelaksanaan akan lebih jelas dalam segi arah dan perencanaannya secara berkelanjutan

Sosialisasi merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberikan informasi terkait dengan maksud dan tujuan kita, sosialisasi yang dilakukan sebagai bentuk upaya memberikan informasi kepada masyarakat, dan memberikan sosialisasi melibatkan edukasi. Saat ini upaya yang harus dilakukan untuk sosialisasi dan edukasi adalah pemberian vaksin. Saat ini program vaksinasi terus digencarkan dengan adanya pandemi Covid-19. Dengan adanya sosialisasi adalah sebagai sarana penyampaian program vaksinasi kepada masyarakat secara maksimal dan memberikan edukasi agar rasa kepercayaan masyarakat terhadap vaksin dan pentingnya vaksinasi yang harus dilakukan.

Puskesmas kedopok kecamatan kedopok kota probolinggo dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan melaksanakan kegiatan vaksinasi kepada masyarakat dengan menyeluruh. Dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksin pihak puskesmas kedopok memkasimalkan pemberian vaksinasi kepada masyarakat sebagai bentuk pengimplementasikan kebijakan tentang pelaksanaan vaksin. Implementasi kebijakan vaksinani sangat berpengaruh pada saat ini mengingat target masyarakat harus mengikut kewajiban untuk vaksin. Dengan adanya kebijakan sosialisasi vaksinisasi dinas kesehatan kota probolinggo peran serta puskesmas kedopok dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

Faktor Keberhasilan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2006:142

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Karakteristik organisasi pelaksana.
4. Sikap para pelaksana.
5. Komunikasi pelaksanaan.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Adapun kelebihan dan kekurangan dalam proses implementasi kebijakan

pemerintah tentang vaksinasi COVID-19 dimana Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmantan dan Raul A. Sabatier menguraikan Kelebihan

1. Adanya rasa tanggung jawab bagi semua actor yang terlibat dalam implementasi
2. Dukungan politik yang kuat
3. Sesuai prosedur aturan

Kekurangan

1. Tidak ada control/ pengawasan terhadap proses implementasi kebijakan
2. Proses implementasi kebijakan memakan waktu yang lama
3. Tidak adanya partisipasi masyarakat

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan dengan menggunakan perspektif teoritis, empat variabel yang ada di implementasi suatu kebijakan George C Edwards III dalam Implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam program sosialisasi vaksinasi COVID-19 di puskesmas Kedupok Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo cukup memenuhi variabel tersebut. Akan tetapi masih ditemui kekurangan yang ada dalam implementasinya, yakni:

1. Komunikasi : Masih ditemui masyarakat yang merasa takut divaksin sehingga menimbulkan hambatan dalam proses implementasi kebijakan vaksinasi akan tetapi dapat diatasi dalam bentuk sosialisasi yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dan vaksinator Puskesmas Kedupok sebagai tempat vaksinasi.
2. Sumber daya: sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 seperti Dinas Kesehatan dan Puskesmas di kota Probolinggo
3. Disposisi: para pelaksanaan kebijakan vaksinasi COVID-19 ditunjuk selaras dengan keterampilan yang dipertimbangkan selektif dari Dinas

Kesehatan Kota Probolinggo disebarakan di beberapa tempat vaksinasi seperti Puskesmas dll.

4. Struktur Birokrasi: Susunan suatu birokrasi yang ada di organisasi Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Selain itu ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) no.84 Tahun 2020 yang dilaksanakan cukup bagus dari implementasi kebijakan..

Saran

Perlu adanya tindakan tegas untuk masyarakat yang tidak mengikuti kebijakan vaksinasi dan tidak menjadi provokator dalam keberlangsungan kebijakan dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asyafin et al., 2021; Nadiyah, 2021; Nizaar, 2020; Nugroho et al., 2020; Sukmana et al., 2021; Tiantara, 2021; Umasugi, 2021)Asyafin, M. A., Virdani, D., Kasih, K. D., & Arif, L. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 4(2), 501–510. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18061>
- [2] Nadiyah, C. (2021). Meninjau Vaksinasi Covid-19 Kebijakan Kesehatan Dalam Perspektif Publik DiKabupaten Kartanegara.
- [3] Nizaar, M. (2020). Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Dalam Sosialisasi Dan Komunikasi Program Pola Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Keprabon Dan Desa Sidowayah). *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 152. <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i2.2615>
- [4] Nugroho, E. E., Mahsyar, A., & Usman, J. (2020). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Gizi Buruk Pada Balita di Kabupaten Enrekang. *Journal.Unismuh.Ac.Id*, 1(2), 701–714. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ki-map/article/view/3709/3001>
- [5] Sukmana, R. A., Iyansyah, M. I., Wijaya, B. A., & Kurniawati, M. F. (2021).

-
- Implementasi Strategi Komunikasi Kesehatan dalam Meyakinkan Masyarakat untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 409–419. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/13933>
- [6] Tiantara, E. P. (2021). Implementasi Kebijakan Program Kesehatan. 72–81.
- [7] Umasugi, M. T. (2021). Sosialisasi dan Edukasi Pemberian Vaksin Sebagai Upaya Trust Pada Masyarakat Kota Ambon. *JAHE (Journal of Human and Education)*, 1, 1–3. <http://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/12>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN